

Jurnal Studi Ilmu Politik, di Publish oleh Program Studi Ilmu Politik
FISIP UIN Raden Fatah Palembang

Strategi Komunikasi Politik Kepala Desa dalam Mewujudkan Good Governance

Afif Musthofa Kawwami¹, Puja Islamia²

^{1,2}**Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang**

Email : Afif.musthofa.kawwami_uin@radenfatah.ac.id

ABSTRACT

The propose of this study is to determine the political communication strategy by the village head in realizing. Good Governance in Lawang Agung Village North Rawas Musi and the supporting and inhibiting factors in carrying out this strategy. This study uses wualitative methodes, data collection with the method of interview, observation, and dpcumentation. Reserch result village goverments have their respective strategies in achieving good governance. This strategy is of course done by understanding the character community, provide the best possible service to the community, provide empowerment programs for the community, and maintains good relerionship and communication with the community. This of course will become a benchmark for the community for the performance of the village goverment in prosper society. Supporting factors for implementing this strategy is to maintain good comunication with the comunity. The inhibiting factors is lack of community participanton.

Keywords: *Good Governance, Communication Strategy*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui strategi komunikasi politik oleh kepala desa dalam mewujudkan Good Governance di Desa Lawang Agung Musi Rawas Utara dan faktor pendukung serta penghambat dalam melakukan strategi ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian pemerintahan desa memiliki strateginya masing- masing dalam mencapai good governance. Strategi ini tentunya dilakukan dengan memahami karakter masyarakat, memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat, memberikan program – program pemberdayaan bagi masyarakat, dan menjaga hubungan serta komunikasi yang baik dengan masyarakat. Hal ini tentu saja akan menjadi tolak ukur masyarakat atas kinerja pemerintah desa dalam mensejahterakan masyarakat. Faktor pendukung untuk melaksanakan strategi ini ialah menjaga komunikasi yang baik dengan masyarakat. Faktor penghambat ialah kurangnya partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Good Governance, Strategi Komunikasi

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kesatuan dari pemerintahan pusat dan daerah, yang secara spesifik diatur dalam pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang (Budianto, 2019).

Pasca reformasi 1998, melalui perubahan UUD 1945, kewenangan pemerintah pusat dan daerah mengalami perubahan yang begitu signifikan. Demikian itu terlihat dalam sistem ketatanegaraan dari sentralisasi menuju arah desentralisasi. Terdapat dua hal yang menarik dalam proses transisi politik di Indonesia diawal-awal reformasi. *Pertama* tujuan arah politik Indonesia berubah dari otoritarian menuju arah yang demokratis. *Kedua*, pemerintahan dan arah pembangunan lokal dan nasional dari sentralistik berubah menjadi desentralisasi (Ari Dwipayana dan Sutoro Eko, 2003;1). Dengan demikian proses reformasi mewujudkan dua format baru dalam perkembangan hukum tatanegara, hubungan politik dan pemerintahan yang otoritas–sentralistik melahirkan demokratisasi-desentralistik.

Pasca reformasi semangat otonom dan desentralisasi memang berhembus demikian kuat di dalam masyarakat dan juga di lingkungan pemerintahan. Tidak jauh berbeda dengan kedudukan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa (Fadli et al., 2022; Harahap & Anisyah, 2021; Waty, Mirza & Fadli, 2022). Masa reformasi atau perubahan yang telah terjadi dari orde lama sampai ke orde baru sekarang ini menuntut pemerintah untuk berkerja keras dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, mulai dari pemerintahan kota sampai dengan pemerintahan desa (Fauzan, Yenrizal & Harahap, 2022; Nabilah, Izomiddin & Harahap, 2022). Keberhasilan serta kesejahteraan di suatu kota atau desa tentunya terletak pada pemerintahan yang ada di dalamnya baik dari siapa pemimpinnya sampai kebijakan–kebijakan yang dikeluarkan nya untuk mengatur tatanan wilayah tersebut (Mislawaty, Harahap & Anisyah, 2022; Ummah, Maryam & Wahidin, 2022; Wahyuni & Suswanta, 2021). Namun, tidak hanya kerjasama yang baik diantara keduanya akan tetapi, hal itu pun harus didasari dengan rasa nasionalisme yang tinggi terhadap bangsa dan negara. Sehingga tidak akan ada perpecahan didalamnya (Marthen, Harahap & Yulion, 2022; Ropik & Qibtiyah, 2021).

Pengaruh era globalisasi pada saat ini membuat kondisi menjadi sangat rentan terhadap penurunan rasa nasionalisme. Sedangkan rasa nasionalisme ini merupakan bagian

terpenting yang harusnya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari (Anisyah, 2022; Sholihin et al., 2022). dengan tujuan menjaga agar tidak terjadi perpecahan diantara pihak masyarakat dan pihak pemerintah. Nasionalisme ini pada prinsipnya merupakan pandangan atau paham kecintaan rakyat indonesia terhadap bangsa dan tanah air yang didasarkan pada nilai-nilai pancasila yang diarahkan agar bangsa indonesia senantiasa menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi (Hidayati, Sutikno & Erawanto, 2022; Hidayaturrahman et al., 2022; Singgalen et al., 2022).

Mempersatukan masyarakat merupakan tugas utama yang harus dilakukan oleh tokoh-tokoh pemerintahan. Usaha dalam pencapaian keutuhan bermasyarakat ini tentunya juga memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat (Ardiyansyah & Maielayuskha, 2022; Yusnaini and Ginting, 2021). Selain kebijakan pemerintah yang dapat menyatukan masyarakat dengan segala kepentingannya, pemerintah juga harus memiliki hubungan baik terhadap masyarakat sekitar. Guna mempererat hubungan diantara keduanya sehingga adanya persatuan yang kokoh dalam bermasyarakat (Harahap, Zalpa & Yumitro, 2021; Kostanian, 2021). Hubungan ini ialah hubungan komunikasi yang baik dari pihak pemerintah dan juga pihak external seperti pihak swasta lainnya.

Komunikasi pada umumnya merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini didasari oleh kodratnya manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain (Mislawaty, Harahap & Anisyah, 2022). Komunikasi itu sendiri berawal dari interaksi antar individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok (Ardiyansyah & Maielayuskha, 2022). Komunikasi yang dilakukan secara terus menerus akan menghasilkan suatu informasi. Maka dari itu semakin banyak orang melakukan interaksi atau komunikasi baik dengan sesama individu atau kelompok, maka akan semakin banyak pula informasi yang didapatkan, dengan kata lain komunikasi ini merupakan suatu proses perpindahan informasi, perasaan, ide dan pikiran seseorang individu kepada individu atau sekelompok individu yang lainnya (Muhammad Takari 2019;1). Disaat yang bersamaan, komunikasi ini tidak hanya dibutuhkan oleh individu melainkan juga oleh kelompok, seperti halnya sekelompok organisasi pemerintah yang melakukan serangkaian komunikasi politik guna mampu untuk menjangkau semua simpati masyarakat agar tidak terbawa oleh gelombang politik yang apatis di kalangan masyarakat (Harahap et al., 2021). Komunikasi politik yang dilakukan oleh suatu organisasi pemerintah baik kota maupun pemerintahan desa sangat berguna untuk mengenalkan identitas diri serta mengenalkan kebijakan-kebijakan

yang akan diterapkan dan dilaksanakan dalam pencapaian kesejahteraan dimasa yang akan datang (Anderson, 2021).

Berdasarkan penjelasan diatas, Pemerintah yang menjalin Komunikasi dengan mentransformasi pesan – pesan yang bermuatan politik ini seperti segala bentuk aktivitas atau kegiatan politik harus bisa disampaikan dengan baik dan percaya dirdipertanggung. Aktivitas atau kegiatan ini mengandung pesan yang mencakup semua bentuk ide, sikap dan perilaku serta aturan – aturan politik yang berlaku. Aktivitas atau kegiatan ini disampaikan guna mengenalkan serta mencapai tatanan pemerintahan yang baik dan biasa disebut good governance (Umaimah Wahid 2016;13).

Pencapaian Good Governance pada dasarnya dilakukan secara desentralisasi yakni dilakukan oleh pemerintah setempat sebab tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat diserahkan kepada pemerintah daerah tersebut. Pemerintah bisa mengatur serta mengelola tata pemerintahan secara kolaboratif antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat sipil dengan baik. Sehingga kualitas pelayanan publik menjadi baik, angka korupsi menjadi semakin rendah, dan pemerintah menjadi semakin peduli dengan kepentingan warga masyarakat. *Good Governance* merupakan suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pihak– pihak yang terkait sehingga terjadi penyelenggara pemerintahan yang bersih demokratis, efektif, dan sesuai dengan cita-cita terbentuknya masyarakat yang makmur, sejahtera dan mandiri (Mayori et al., 2021; Saraswati & Rijal, 2022) .

Tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) ialah hal yang pada umumnya menjadi harapan bagi masyarakat untuk menjamin kesejahteraan masyarakat yang ada di kota maupun di desa (Ummah, A., Maryam, S., & Wahidin, 2022). Sistem pemerintahan yang dapat dipertanggung jawabkan seperti kebijakan–kebijakan yang telah dikeluarkan atau ditetapkan serta adanya pelayanan yang baik akan menjadi tolak ukur masyarakat terhadap kemajuan desa tersebut.

Desa Lawang Agung ialah salah satu desa yang terletak di kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan. Desa Lawang Agung ini dipimpin oleh seorang kepala desa dan para staf yang ada didalamnya, untuk mencapai Good Governance atau tata pemerintahan yang baik tentu saja para tokoh pemerintahan ini selaku kepala desa beserta staff harus bisa memberikan pelayanan serta transparansi kerja kepada masyarakat. Hal ini dimaksudkan bahwa pemerintah harus memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan

masyarakat seperti pelayanan pengurusan berkas, pemberian bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan serta pemberdayaan masyarakat.

Mengapa demikian, karena masyarakat akan menilai secara langsung terhadap pemerintahan yang ada, berdasarkan program-program yang diberikan kepada mereka. Tentu saja hal ini akan memiliki dampak buruk terhadap hubungan pemerintah dan masyarakat dikemudian hari apabila tidak hal tersebut tidak terlaksana. Tidak hanya hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang harus dijaga melainkan transparansi kerja pun sangat dibutuhkan yakni pengelolaan keuangan secara terbuka, pembagian bantuan yang merata, serta wajib menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat. Begitupun sebaliknya apabila pemerintahan desa setempat dapat memberikan pelayanan yang baik serta transparansi kerja yang baik maka hubungan baik pun akan terjalin serta masyarakat pun akan merasa puas dan sejahtera.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk mencari jawaban permasalahan atau proses penemuan. Secara garis besar tujuan penelitian terdiri dari tiga macam yakni penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Tujuan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan melakukan penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif (Creswell et al., 2007). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis data berupa kata, kalimat, skema dan gambar. Muri Yusuf (2019) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mencari makna, pemahaman, pengertian. *Verstehen* tentang suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung dan tidak langsung dalam *setting* yang diteliti, kontekstual, dan menyeluruh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Pendekatan deskriptif analisis adalah suatu pengumpulan data secara kaya dari suatu fenomena yang ada untuk dianalisis, sehingga diperoleh gambaran terhadap apa yang sudah diteliti. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan tingkah laku.

HASIL DAN DISKUSI

Dalam bab ini penelitian akan membahas tentang strategi Komunikasi politik kepala desa dalam mewujudkan *Good Governance* di desa lawang agung musi rawas utara, serta membahas apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam penerapan komunikasi politik tersebut untuk mewujudkan *Good Governance* dan faktor yang menghambat proses tersebut. Strategi komunikasi disini ialah suatu cara untuk mendapatkan

sesuatu yang diinginkan. Kata strategi merujuk pada seperangkat komponen atau unsur dalam komunikasi yang sangat spesifik berdasarkan konteks yang dihadapi untuk mencapai keberhasilan atau efektivitas berkomunikasi.

Dalam strategi komunikasi ini akan ada perencanaan, taktik, pengenalan lapangan, pelaksanaan sampai pada target sasaran. Dengan demikian strategi komunikasi ini ialah perencanaan yang berada dalam satu konteks atau sebuah situasi yang memiliki peran penting untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Penganalisisan data penelitian yang diperoleh dilapangan akan dianalisis dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Thompson, yang menyatakan bahwa terdapat beberapa unsur dari strategi komunikasi politik yakni pertama *visi organisasi dan prespektif* unsur yang harus dimiliki dan dijadikan acuan dalam mengatur lebih lanjut aktivitas komunikasi masyarakat, Kedua *rencana*, ialah menetapkan rencana yang diturunkan dari visi dan misi, perencanaan ini dapat diperoleh dari serangkaian data informasi yang didapatkan ketika dilapangan, Ketiga *menetapkan taktik* yakni cara-cara mudah yang harus dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan internal serta situasi atau keadaan di lapangan. Keempat *meletakkan posisi atau kedudukan organisasi*, ialah menempatkan beberapa komponen dalam komunikasi seperti komunikator, sumber, pesan, serta target sasaran. Kelima *menyusun pola aktivitas komunikasi* seperti memperjelas strategi yang akan dilakukan sehingga dapat diikuti atau dijalankan oleh semua pelaku komunikasi. Teori ini dianggap peneliti mampu untuk menganalisis strategi komunikasi politik untuk mewujudkan *Good Governance* di desa lawang agung musirawas utara.

Strategi Komunikasi Politik Kepala Desa dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Lawang Agung Musirawas Utara

Strategi komunikasi merupakan suatu cara yang banyak dilakukan dan diterapkan oleh berbagai pihak untuk mencapai keberhasilan atau efektifitas dalam berkomunikasi. Strategi komunikasi ini sering dilakukan oleh berbagai pihak salah satunya para pelaku politik atau pemerintahan mulai dari pemerintahan kota sampai dengan pemerintahan desa. strategi ini dilakukan untuk menyampaikan pesan-pesan politik yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan biasa disebut komunikasi politik.

Adanya strategi ini, para pelaku politik atau pemerintahan dapat mengarahkan serta mengatur kebijakan – kebijakan yang akan diterapkan terhadap masyarakat setempat guna mencapai tata pemerintahan yang lebih baik lagi. Komunikasi politik ini juga dapat disampaikan secara langsung ataupun tidak langsung kepada masyarakat.

Peneliti melakukan analisis dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Thompson bahwa yang *pertama* yaitu visi organisasi dan perspektif yang dilakukan untuk dijadikan acuan dalam mengatur visi dan misi yang telah dibuat.

Penjelasan ini ditegaskan kembali oleh Bapak Safaruddin selaku sekretaris desa di desa Lawang Agung Musi Rawas Utara, “Masyarakat yang ada di desa kita memiliki ragam budaya yang berbeda-beda, tentunya kita sebagai pelaku pemerintahan harus bisa memahami karakter masyarakat. Hal ini pun tentunya tidak mudah bagi kami dalam berkomunikasi untuk menyampaikan pesan-pesan politik atau aturan – aturan yang akan diterapkan ke dalam lingkungan masyarakat tersebut. Maka dari itu kami memiliki visi dan misi agar dapat mengarah kami dalam menyampaikan dan mewujudkan keinginan dari masyarakat itu.”

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa pemerintahan di desa lawang agung ini melakukan pendekatan terhadap masyarakat guna meningkatkan komunikasi serta hubungan baik di antara keduanya. Hal ini pun sesuai dengan teori Thomson, yakni dalam mencapai komunikasi yang baik haruslah memiliki visi dan misi untuk mencapai hal yang diinginkan. Secara hakikatnya masyarakat ialah makhluk individu dan juga makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Hubungan sosial ini bisa terjadi pada sesama manusia yang sudah dikenal maupun baru pertama kali bertemu dalam kehidupan sehari-hari. Lingkungan masyarakat merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan oleh pelaku politik untuk mencapai tata pemerintahan yang baik di dalam desa. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Bapak Kaharudin Az. Selaku Kepala desa di desa Lawang Agung Musi Rawas Utara, “kami sebagai pelaku pemerintahan berkewajiban untuk menyatukan masyarakat untuk menjadi satu kesatuan dalam menyejahterakan masyarakat yang ada di desa, serta kami sebagai pelaku pemerintah harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat”.

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan diatas dapat dipahami bahwa lingkungan masyarakat dapat dikatakan baik apabila masyarakat di dalamnya memiliki karakter yang baik pula, karena manusia seringkali dinilai dari karakter dan kepribadiannya, dua hal yang berbeda tetapi tidak jarang dipahami secara sama. Karakter manusia pada umumnya diletakkan pada norma moral yang dimilikinya, sedangkan kepribadian merupakan sifat hakiki yang tercermin pada sikap manusia yang membedakan dari manusia lainnya.

Pemerintahan desa di desa lawang agung ini melakukan pendekatan guna untuk memahami kondisi dan situasi serta memahami kebutuhannya dalam bermasyarakat. Sedangkan, karakter ini bisa dibentuk dan dirubah oleh pengaruh lingkungan dan manusia

lain yang saling berhubungan atau berinteraksi. Karakter ini tentu saja memiliki pengaruh terhadap perilaku manusia. Karena perilaku tersebut secara langsung dapat menunjukkan tanggapan masyarakat terhadap kebijakan atau aturan yang akan dibuat.

Perilaku masyarakat ini biasanya disebut dengan perilaku politik yakni perilaku masyarakat yang berasal dari dalam diri seseorang seperti persepsi, sikap, orientasi dan keyakinan serta tindakan-tindakan nyata terhadap lingkungan sekitar. Perilaku politik yang baik akan menimbulkan tanggapan yang baik pula terhadap lingkungannya.

Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Safaruddin selaku sekretaris desa di desa Lawang Agung Musi Rawas Utara, “Kebijakan-kebijakan yang akan kita keluarkan tentunya akan menimbulkan persepsi atau tanggapan masyarakat, baik buruk nya untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di desa kita. Maka dari itu, dengan adanya tanggapan ini lah kita bisa menyeleksi serta merevisi aturan – aturan yang seharusnya dikeluarkan.”

Tidak hanya itu, Bapak Kaharudin Az. Selaku kepala desa di desa Lawang Agung Musi Rawas Utara ini juga mengemukakan: “Keberhasilan dan kesejahteraan desa itu tentu saja berasal dari kerjasama masyarakat, kami selaku pelaku pemerintah selalu menerima dan mendukung masukan-masukan dari masyarakat karena aturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat”

Berdasarkan penjelasan ini dapat kita pahami pemerintahan didesa Lawang Agung mengeluarkan Kebijakan-kebijakan yang berupa bentuk aturan atau asas yang menjadi dasar pedoman bagi seluruh masyarakat dalam pencapaian kesejahteraan bersama. Hal ini pun sesuai dengan teori thomson yang menyatakan bahwa dalam membangun komunikasi yang baik harus melaksanakan visi atau rencana yang telah kita buat.

Kedua menurut Thompson yaitu menetapkan serangkaian rencana yang diturunkan dari visi dan misi. Artinya melaksanakan visi dan misi yang telah dibuat oleh pemerintah agar dapat mengarahkan pelaku politik dalam mewujudkan keinginan masyarakat.

Pemerintahan desa lawang agung memiliki visi dan misi yang dijadikan pedoman bagi masyarakat terutama para pelaku politik. Visi ini ialah salah satu cara pandang serta tekad untuk mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat dan pemerintahan desa.

Desa lawang agung memiliki pemerintahan yang sangat memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintahan didesa lawang agung ini memiliki visi yakni 1). Melihat potensi serta mencari permasalahan pembangunan yang ada di desa, 2). Mengembangkan sistem perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan yang ada didesa, 3).

Memanfaatkan sumber pendapatan yang dihasilkan oleh desa untuk kesejahteraan bersama, 4). Mengelola administrasi yang ada di desa secara profesional.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa tidak semua masyarakat ikut serta untuk menjalankan program yang telah dibuat oleh pemerintah, karena masyarakat yang masih memiliki rasa apatis terhadap kesejahteraan masyarakat.

Keempat menurut Thompson yaitu meletakkan posisi atau kedudukan organisasi maupun program komunikasi dalam konteks lingkungan yang dihadapi. Program-program yang telah diberikan seperti yang telah dijelaskan di atas merupakan strategi atau cara pemerintah untuk meningkatkan kualitas desa dari berbagai bidangnya.

Good Governance atau biasa disebut dengan tata pemerintahan yang baik merupakan salah satu tujuan pemerintah dimulai dari pemerintah desa sampai dengan pemerintah kota. *Good Governance* (tata pemerintahan yang baik) dapat kita capai dengan berbagai strategi seperti yang telah dijelaskan di atas, namun tidak kalah penting juga yaitu pelayanan prima kepada masyarakat.

Pelayanan yang merupakan hal paling utama yang seharusnya diterapkan oleh pemerintah dan ditujukan untuk masyarakat, karena pelayanan akan menjadi tolak ukur masyarakat dalam menilai baik dan buruknya suatu pemerintahan. Pelayanan yaitu suatu tindakan yang meliputi ketepatan, kecepatan, keramahan, dan kenyamanan. Seperti kita ketahui pelayanan yang baik sangat jarang didapatkan oleh masyarakat. Maka dari itu dalam pencapaian tujuan *good governance* pemerintah seharusnya memberikan pelayanan yang baik untuk seluruh masyarakatnya.

Dari penjelasan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa baik buruknya pelayanan yang diberikan tersebut tentunya berdasarkan kualitas dari sumber daya manusia yang ada. Tujuan pemberian pelayanan yang baik tentunya untuk mencapai tata pemerintahan yang baik sehingga masyarakat merasa sejahtera serta menjadi desa yang terdepan dari segala bidang. *Kelima* menurut Thompson ialah menyusun pola aktivitas komunikasi, sehingga strategi menjadi lebih jelas dan dapat diikuti atau dijalankan oleh semua pelaku komunikasi.

Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Dalam Menerapkan Komunikasi Politik Dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Lawang Agung Musi Rawas Utara.

Good Governance yang merupakan serangkaian kegiatan pemerintah yang memiliki tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan yang ada di Desa Lawang Agung memiliki berbagai kegiatan yang telah diupayakan untuk meningkatkan kemakmuran

masyarakat diberbagai bidang nya. Dalam hal ini kerjasama dari kedua pihak sangat dibutuhkan. Kerjasama antara masyarakat dan pemerintah desa secara baik telah menunjukan jika keduanya memiliki komunikasi yang sangat baik pula.

Strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa lawang agung ini untuk mewujudkan good governance tentunya tidak selalu lancar melainkan juga memiliki faktor penghambatan dan pendukungnya.

Faktor Penghambat

Faktor-Faktor yang menjadi penghambat dalam mewujudkan good governance di desa Lawang Agung ini ialah sebagai berikut:

1. Kurangnya partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk berjalannya program yang telah diselenggarakan pada pemerintahan, tetapi pada kenyataannya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi masih sangat kurang. Program – program yang diberikan tentu saja memiliki tujuan untuk memberikan kesejahteraan serta rasa nyamanan bagi seluruh masyarakat yang tinggal di desa tersebut. Maka dari itu, kontribusi masyarakat sangat dibutuhkan untuk merealisasikan program – program yang telah dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat.

2. Kurangnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia atau masyarakat yang ada di desa Lawang Agung ini tentunya memiliki latar belakang yang berbeda – beda dimulai dari taraf pendidikan yang rendah sampai dengan yang tertinggi. Hal ini sangat berpengaruh terhadap keinginan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, mengapa demikian masyarakat yang memiliki taraf pendidikan yang tinggi akan cenderung berperan aktif dalam mewujudkan *Good Governance* atau pemerintahan yang baik sedangkan masyarakat yang memiliki pendidikan yang lebih rendah cenderung kurang berperan aktif dalam mewujudkan bentuk pemerintahan yang baik.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa segala rencana untuk mencapai tujuan harus didasari dengan kerja sama yang baik. Hal ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan yang akan dicapai nantinya. Seperti halnya kesejahteraan masyarakat, dan keberhasilan pemerintah desa dalam melaksanakan segala program – program nya sangat dibutuhkan kerja sama antar banyak pihak, terutama masyarakat didalamnya. Pemerintah memberikan program serta menjalankan dan masyarakat menjalankan program tersebut.

KESIMPULAN

Pencapaian *Good Governance* di Desa Lawang Agung Musi Rawas Utara dapat dilakukan dengan melaksanakan beberapa strategi, diantaranya ialah memahami karakter masyarakat, memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat, memberikan program – program pemberdayaan bagi masyarakat, dan menjaga hubungan serta komunikasi yang baik dengan masyarakat. Pelaksanaan ini dilakukan secara berulang yakni setiap satu tahun sekali dan sesuai dengan keadaan masyarakat, tidak menutup kemungkinan kegiatan ini disesuaikan dengan kondisi yang ada. Pelaksanaan strategi ini tentunya tidak selalu berjalan dengan baik, akan tetapi pelaksanaan ini pun memiliki beberapa faktor penghambat dan faktor pendukung diantaranya sebagai berikut : Faktor penghambat diantaranya ialah seperti berikut: a) kurangnya partisipasi masyarakat hal ini dikarenakan selain aktivitas masyarakat yang sibuk sendiri, masyarakat juga memiliki sifat acuh tak acuh terhadap pemerintah; b) kualitas sumber daya manusia yang memiliki maksud ialah kualitas bisa berasal dari latar pengetahuan yang luas serta pendidikan yang memadai, karena masyarakat yang memiliki kualitas yang baik biasanya mereka cenderung berperan aktif dalam pelaksanaan program pemerintah; c) kurangnya kedisiplinan dari para pelaku pemerintahan itu sendiri, seperti halnya masih ada beberapa oknum yang masih kurang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sementara, faktor pendukung dalam mencapai *Good Governance* di Desa Lawang Agung Musi Rawas Utara yakni sebagai berikut: a) memiliki komunikasi yang baik antar sesama makhluk sosial, seperti menjaga komunikasi dengan masyarakat dan pihak lainnya. b) Memiliki kerja sama yang baik

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, I. (2021). The Influence of Political Awareness, Political Socialization, and Mass Media on Political Participation in Jambi Province. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 5(2), 203–216.
- Anisyah, S. (2022). Women Pregnancy amidst Covid-19: Understanding Vulnerability, Developing Vaccine Strategy, and Capacity in Palembang. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 6(2), 205–216. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v6i2.13350>
- Ardiyansyah, A., & Maielayuska, M. (2022). Political Communication Instruments Fasha Maulana in Influencing Millennial Voter: Evidence from Jambi Mayoral Election in 2019. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 6(2), 232–244. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v6i2.13614>
- Budianto, K. (2019). Gaya Kepemimpinan Kepala Kantor Wilayah Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja Pegawai. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 223–233. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/4677%0Ahttp://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/download/4677/2701>
- Creswell, J. W., Hanson, W. E., Clark Plano, V. L., & Morales, A. (2007). Qualitative Research Designs: Selection and Implementation. *The Counseling Psychologist*, 35(2),

- 236–264. <https://doi.org/10.1177/0011000006287390>
- Fadli, A. M. D., Abdoellah, O. S., Widanarto, A., & Muradi, M. (2022). Power Relation and Cooperation between Actors: Issue of Nickel Mining Business Licenses in Konawe Regency. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 6(2), 150–162. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v6i2.13692>
- Fadillah, Dani. (2010). "Strategi Komunikasi Politik Evo Morales". Skripsi. Pada Jurusan Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Fauzan, A., Yenrizal, Y., & Harahap, R. (2022). Kontradiksi antara Keulamaan dan Peran Politik Analisis Syofwatillah Mohzaib Selama menjadi Anggota DPR RI Sumatera Selatan Periode 2014-2019. *Jurnal Prodi Ilmu Politik*, 1(1), 1–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jsipol.v1i1.12195>
- Harahap, Raegen., Zalpa, Y., & Yumitro, G. (2021). Islam and Populism: Palembang (Indonesia) Mayor Election in 2018. *The Indian Journal of Politics*, 55(2), 1–15.
- Harahap, R., & Anisyah, S. (2021). Re-Interpretasi Utopisme "Palembang Emas Darussalam" melalui Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Palembang. *Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 4(1), 16–27. <https://doi.org/10.36341/jdp.v4i1.1700>
- Harahap, R., Hati, P. C., & Abdussalam, K. (2021). Konvergensi Sebagai Sarana Bertahan Media Massa: Case Study Tribun Sumsel. *Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization*, 2(2), 118–132. <https://doi.org/10.19109/ampera.v2i2.8428>
- Hidayati, H., Sutikno, A. N., & Erawanto, S. (2022). The Pivotal Issues of Human Rights: A Literature Review by Eight World Researchers. *Jurnal Studi Sosi*, 6(2), 30–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v6i1.10198>
- Hidayaturrahman, M., Hamhij, N. A., Sugiantiningsih, A. A. P., Ubaid, A. H., & Elazhari, E. (2022). Political Broker Giving Money and Intimidating in Regional Head Elections in Indonesia. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 6(2), 177–190. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v6i2.10102>
- Jumadi dan Irene Silviani. (2020). "Peranan Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera dalam mempertahankan kepercayaan publik di daerah pilihan III Kota Medan) . *Jurnal Ilmiah Komunikasi Politik*. Vol 5 No. 1 : hlm 44-61.
- Kostanian, A. (2021). The Heretic Nature of Al-Qaeda's Ideology. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 5(2), 148–156. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v5i2.9655>
- Marthen, T., Raegen, H., & Yulion, Z. (2022). Distance Learning during COVID-19 in South Sumatera: Challenges and Government Strategy. *Proceeding for the International Conference on Social Studies and Humanities*.
- Mayori, H. (2021). PALEMBANG EMAS DARUSSALAM: RESURGENCE MALAY CONSCIOUSNESS THROUGH PUBLIC POLICY IMPLEMENTATION. *The 7th International Seminar on Social, Humanities, and Malay Islamic Civilization*, 47–66.
- Maryam, Neneng Siti. (2016). "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik". *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*. Vol VI No. 1: hlm 1-18.
- Mislawaty, Harahap, R., & Anisyah, S. (2022). Digitalizing Governance in South Sumatera: An Introduction "E-Sumsel" System Reforming Public Service Management. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 14(3), 399–411. <https://doi.org/https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.399-411>
- Nabilah, R., Izomiddin, I., & Harahap, R. (2022). Fenomena Rekrutmen Artis Anggota Legislatif Ditinjau dari Perspektif Teori Partai Politik. *Jurnal Prodi Ilmu Politik*, 1(2), 81–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jsipol.v1i2.13710>

- Putra, Hendi Sandi. (2017). “ Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri”. *Jurnal Politik Muda*. Vol 6 No. 2 : hlm 1-11.
- Ropik, A., & Qibtiyah, M. (2021). Millennial Political Concerns and Political Preferences towards Presidential Election in 2019: Evidence from Palembang. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 5(2), 189–202.
- Saragih, Ramainim dan Sarwititi Agung. (2017). “Peranan Komunikasi Politik Pemerintah Dalam Upaya Peningkatan Partisipatif Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dana Desa”. ISSN. Vol 7 No. 1 : hlm 1-11.
- Saraswati, Yana Dwifa, Najamuddin Khairur Rijal, and S. M. D. (2022). #MeToo Movement: Global Civil Society in Fighting Sexual Harassment in South Korea. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 6(2), 163–176. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v6i2.11936>
- Sholihin, E. B., Harahap, R., & Zalpa, Y. (2022). DOES THE PANDEMIC DECLINE OR MAINTAIN DEMOCRACY? TWO SIDES EFFECTS OF PANDEMIC ON. *The Sunan Ampel Review of Political and Social Sciences*2, 01(02), 16–39.
- Singgalen, Y. A., Sijabat, R., Widyastuti, P., & Harnadi, A. (2022). Community Empowerment and Social Welfare Development through Social Entrepreneurship. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 6(2), 217–231. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v6i2.13302>
- Sugiyono. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta. Cet, Ke-26.
- Takari, Muhammad. (2019) *Memahami Ilmu Komunikasi*. Makalah. Pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara.
- Ummah, A., Maryam, S., & Wahidin, D. (2022). E-Government Implementation to Support Digital Village in Indonesia: Evidence from Cianjur Village, Bogor Regency. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 6(2), 245–259. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v6i2.14038>
- Wahid, Umainah. (2016). *Komunikasi Politik: Teori, Konsep, dan Aplikasi Pada Era Madia Baru*. Bandung : Simbiosis Rakatama Media.
- Wahyuni, Herpita, Suswanta Suswanta, and D. E. P. (2021). Social Service and Community Social Worker Program for Empowerment Homeless and Beggars in Yogyakarta. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 5(2), 230–240. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v5i2.6833>
- Waty, R. R., Mirza, I. M., & Fadli, N. M. (2022). Separatism Movement and Contemporary Reconciliation: Causes and its Impact towards Political Development in Papua Reni. *Jurnal Studi Sosi*, 6(2), 134–149. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v6i2.11953>
- Yusnaini, Y., and Ginting, E. (2021). Explaining Role of Cadre Understanding and Values of Political Parties towards Women’s Legislative Candidacy in Jambi. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 5(2), 217–229. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v5i2.9824>
- Yusuf, Muri. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Zainal, Anna Gustina dan Sarwati Sarwoprasodjo. (2018). Strategi Komunikasi Politik Pemerintahan Daerah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pedesaan. *Journal Of Comunication Studies*. Vol. 3 No. 1: hlm. 1-14.